

ABSTRAK

Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu keinginan memperoleh penghasilan yang lebih. Banyaknya devisa yang diterima oleh negara dan daerah asal menjadi salah satu dampak positif dari pengiriman TKI. Selain itu, dengan bekerja di luar negeri, TKI juga mampu memecahkan permasalahan ekonomi keluarga. Namun, pengiriman TKI nyatanya juga memiliki dampak negatif, baik bagi individu TKI maupun bagi keluarga yang ditinggalkan. Dampak negatif bagi individu TKI terlihat dari banyaknya masalah yang menimpa mulai dari pra, selama, sampai pasca penempatan. Sedangkan bagi keluarga TKI, bekerja di luar negeri dapat mempengaruhi ketahanan rumah tangga. Dengan demikian, maka pemerintah daerah telah melakukan sebuah upaya melalui terbitnya Perda No. 12/2006 yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan TKI asal Lombok Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan TKI di Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap TKI yang pernah mengalami masalah selama proses migrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan jika dilihat dari evaluasi usaha yang menilai input, menunjukkan bahwa: alokasi SDM yang digunakan rendah secara kuantitas dan kualitas, alokasi waktu juga menunjukkan proses penanganan masalah TKI yang lamban, sedangkan alokasi biaya menunjukkan ketidakmampuan pelaksana kebijakan dalam memanfaatkan tingginya anggaran yang ada. Dilihat dari evaluasi proses ditemukan bahwa pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas para pelaksana kebijakan untuk menciptakan metode penanganan masalah TKI yang sesuai dengan kondisi masyarakat, tidak ada kerjasama maupun kolaborasi antara instansi terkait, serta tingginya input anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Dilihat dari evaluasi hasil, maka diperoleh hasil yang belum optimal, sebab masih banyak permasalahan TKI yang belum dapat diselesaikan. Dilihat dari evaluasi dampak, ditemukan bahwa: pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan dampak yang signifikan pada masalah-masalah TKI dan keluarga, dampak kebijakan pada kelompok di luar sasaran juga menunjukkan bahwa adanya kebijakan tidak mempermudah mereka dalam melakukan pendampingan masalah-masalah TKI, sedangkan dampak yang tidak diharapkan dapat dilihat melalui adanya Unit Layanan Pembuatan Paspor yang tidak hanya memberi kemudahan pengurusan paspor, namun juga dapat meningkatkan jumlah TKI ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu: pemerintah daerah perlu menambah regulasi mengenai calo/tekong dan regulasi mengenai prosedur untuk melakukan pengaduan, meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam melakukan penanganan masalah TKI, perlu ditambah materi tentang mekanisme yang harus ditempuh TKI ketika mengalami masalah, dan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan; masalah TKI; dampak.

ABSTRACT

East Lombok is a region with the greatest number of Indonesian Migrant Workers shipment. The main factor that encourages the highest number of shipment is because of the desire to get more income. The amount of device which received by state or region of origin become one of positive impact from Indonesian Migrant Workers shipment. Beside that, by working overseas, Indonesian Migrant Workers could solve various family economic problems. However, Indonesian Migrant Workers shipment also have a negative impact, neither for Indonesian Migrant Workers individually nor for their families. Negative impact for Indonesian Migrant Workers individually could be seen from the number of problems that afflict the Indonesian Migrant Workers since pre, during, and after the placement. In order to solve those problems, regional government had done an effort through the issued of Regional Regulation Number 12 the year of 2006 which set about placement and protection for Indonesian Migrant Workers from East Lombok.

This study aimed to evaluate policy implementation of regional government in order to solve Indonesian Migrant Workers problems in East Lombok. The method in this research is a qualitative method with descriptive approach, with an in-depth interview as the data collection technique and Focus Group Discussion.

The results show that the implementation of the policy when viewed from the effort evaluation that assesses the input, indicates that: the allocation of human resources used is low in quantity and quality, time allocation also shows the process of handling the problems of labor migrants are slow, while the allocation of costs shows the inability of policy implementers in utilizing the high budget. Judging from the evaluation process found that the implementation of the policy has not been effective and efficient. This is caused by the low quality of policy implementers to create methods of handling the problems of migrant workers in accordance with the conditions of society, no cooperation or collaboration between related agencies, and the high input budget allocated is not proportional to the output produced. Judging from the performance evaluation, obtained results that have not been optimal because there are still many problems of Indonesian Workers who cannot be solved. Judging from the impact evaluation, it was found that: the implementation of the policy has not produced a significant impact on the problems of migrant workers and the families, the impact of policy on the outside group also shows that the policy does not facilitate them in assisting the problems of Indonesian Workers, is not expected to be seen through the Passport Building Service Unit which not only facilitates the making of passports, but also increases the number of illegal labor migrants.

Based on the results of this study, the authors provide some suggestions, namely: local governments need to increase the regulation of “calo/tekong” and regulations on the procedure to make a complaint, improve human resources competencies, especially to handle the problems of migrant workers, need to be added material about the mechanisms to be taken for migrant workers who are experiencing problems, and also need to increase oversight of budget usage.

Keywords: *Public policy evaluation, problems of migrant workers, impact.*